

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Achmad Roestandi. *Responsi Filsafat Hukum*. Bandung: Armico, 1992.
- Adrian Sutedi. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Amiruddin & Zainuddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Darji Darmodihardjo dalam Hyronimus Rhiti. *Filsafat Hukum; Edisi Lengkap (Dari Klasik sampai Postmodernisme)*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2011.
- Edmon Makarim. *Notaris dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum Tentang Cyber Notary Atau Electronic Notary*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Edisi Kedua, 2013.
- Frans Joseph Diningrat. Wawancara, Notaris di Cilegon, 19 Oktober 2025.
- Friedman. *Teori dan Filsafat Hukum: Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*. Jakarta: Rajawali, 1990.
- Fuadi Munir. *Profesi Mulia: Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- G.H.S. Lumban Tobing. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, 1999.
- Habib Adjie. *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UU Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Hartanti Sulihandar. *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*. Jakarta: Dunia Cerdas, 2013.
- Ibrahim Johny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2006.
- Marzuki Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Munir Fuady. *Teori dan Praktik Kontrak*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.

Novita Dewi Masyitoh. "Mengkritisi Analytical Jurisprudence Versus Sociological Jurisprudence Dalam Perkembangan Hukum Indonesia." Dalam *Al-Ahkam*, XX, Edisi II Oktober 2009.

R. Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2005.

Robert L. Gibson & Marianne H. Mitchell. *Introduction to Counseling and Guidance*. 7th ed. New Jersey: Pearson, 2011.

Soekanto Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Sukmadinata Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Rosda Karya, 2005.

B. Jurnal/Karya Ilmiah

Amanda Reksa M. "Peran Kewenangan dan Tanggungjawab Notaris Dalam Melakukan Pengurusan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Online." *Officium Notarium*, Vol. 3 No. 2, 2023, hlm. 177–179.

Dewi Anisa. "Kolaborasi Notaris dan Konsultan Perizinan dalam Pengurusan Legalitas Usaha." *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 9 No. 4, 2022, hlm. 202.

Dwi Prabowo. "Peran Konsultan Perizinan dalam Proses Perizinan Usaha." *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 5 No. 1, 2019.

Jurnal Hukum. "Peran dan Kewenangan Notaris Terhadap Pendaftaran Izin Usaha Melalui Sistem Online Single Submission." *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, 2022, hlm. 10.

Linda Setiawati & Habib Adjie. "Pembatasan Kewenangan Notaris Dalam Melakukan Praktik Pengurusan Izin Usaha Berbasis Online Single Submission." *Istinbath: Jurnal Hukum*, Vol. 20 No. 1, 2023, hlm. 52–53.

Maryam Siti. "Profesionalisme Konsultan Perizinan dalam Sistem Perizinan Terpadu." *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 12 No. 2, 2020.

Muchsan. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2000.

Nawaaf Abdulah Munsyarif Abdul C. "Kedudukan dan Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Autentik." *Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Islam Sultan Agung*, Vol. 4 No. 4, Desember 2017.

Putra Wahid Wahyudi Faisal & Imanuel Johan. “Memperkuat Peran Notaris Dalam Era Modernisasi (Strengthening The Role Of The Notary In The Modernization).” *Jurnal Legal Reasoning*, Vol. 2 No. 1, 2019, hlm. 18–25.

Saskia Nabilah. Kewenangan Notaris untuk Legalisasi Dokumen Notaris yang Akan Dipergunakan di Luar Negeri Terkait dengan Penerapan The Hague Convention 1961 (Apostille Convention) di Indonesia. Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2022, hlm. 53.

Y. Triana. “Peran Notaris dalam Pendirian Badan Hukum Pasca OSS.” *Jurnal Hukum Kenotariatan Indonesia*, Vol. 3 No. 2, 2021, hlm. 115

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 263 dan 378.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pasal 6–9.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Tata Cara Penyerahan Protokol Notaris.

Majelis Pengawas Pusat Notaris. *Pedoman Pengawasan dan Penjatuhan Sanksi Notaris*. Jakarta: MPP, 2021.